**EXECUTIVE SUMMARY**

**Oleh Vidia Gati**

**MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI ISLAM**

## Latar Belakang

Indonesia dengan total luas wilayah 1.904.569 km² adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau. Dari wilayah yang luas tersebut, Indonesia memiliki kondisi alam yang mendukung keanekaragaman hayati nomer dua terbesar di dunia[1]. Posisi Indonesia yang diapit oleh dua samudra dan dua benua ditambah letaknya tepat di khatulistiwa, membuat wilayah alamnya begitu subur, sehingga wajar jika Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris,yaitu negara yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 menunjukkan bahwa sebanyak 44,3% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, hal ini karena Indonesia sendiri memiliki wilayah yang dominan adalah pertanian yaitu 94,07juta ha adalah lahan yang sesuai untuk pertanian.

Adapun kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry, sumber energy dan pengelolaan lingkungan masuk dalam cakupan pertanian. Sehingga cakupan pertanian meliputi produk dari pertanian sendiri, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perairan.

Definisi pangan menurut UU No. 18 Tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.[2]

---

[1] Indonesia, id.m.wikipedia.org/wik (26 Agustus 2013)
[2] UU No.18 tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pangan memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia. kurangnya ketersediaan pangan akan membuat bencana kelaparan, penyakit dan menurunnya kesejahteraan hidup. Menjadi tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pangan karena salah satu tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Dengan demikian ada tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan yang dibutuhkan dan menjamin keberlanjutannya. Seiring dengan itu diperlukan kesiapan dalam mewujudkan ketahanan pangan (*food security*), kemandirian pangan (*food self-help*) ,dan kedaulatan pangan (*food souverenity*) paling tidak dalam skala nasional.

Indonesia tercatat pernah menjadi Negara yang mampu berswasembada pangan. Indonesia pernah mampu memenuhi bahan pangan pokok yaitu beras, sehingga tidak perlu mendatangkan dari luar. namun prestasi itu tidak berumur panjang. Sekalipun wilayah Indonesia terkenal subur namun sungguh memprihatinkan jika dalam masa-masa sekarang ini justru kesulitan untuk mendapatkan hasil pangan yang diperoleh dari bumi Indonesia sendiri.

Berbagai komoditi satu persatu harus didatangkan dari luar negeri. Jika dahulu hanya buah-buahan tertentu saja yang didatangkan dari luar karena di Indonesia memang tidak ada, namun sekarang ini sayur mayur, daging sapi sampai bumbu masakan seperti cabai, bawang dan garam juga harus didatangkan dari luar negeri.

Globalisasi tidak dapat dipungkiri ikut memperderas serbuan barang-barang dari luar. Apalagi setelah Indonesia bergabung dan meratifikasi berbagai perjanjian baik regional maupun internasional yang melarang adanya hambatan keluar masuk barang dari suatu negara ke negara lain sampai kebijakan bebas tarif. Pasar bebas telah membuat banyak komoditi harus berhadap-hadapan dengan barang atau komoditi dari luar.

Dari berbagai persoalan yang muncul yang merupakan implementasi dari sistem ekonomi saat ini (kapitalis), maka ini akan menjadi tantangan bagi sistem ekonomi alternatif yaitu Islam. Ketika berbicara bagaimana Islam mengatasi persoalan pertanian sekaligus pangan secara umum, maka pembahasannya harus dibedakan antara problem ilmu ekonomi dan problem sistem ekonomi. Seringkali ketika membahas bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menyelesaikan ekonomi ini maka bahasannya menjadi menyempit seputar soal kurma saja. Sesungguhnya Islam adalah agama *ruhiyah* dan *siyasiyah* (politis), artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya saja dalam lingkup ibadah mahdhoh, namun Islam juga mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Cakupan ibadah meliputi bagaimana aturan interaksi manusia satu dengan lainnya, dalam urusan ekonomi, kenegaraan, pendidikan, sosial dan hukum.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut dan mengingat seringnya masalah ini terjadi (seperti siklus yang berulang) maka ada sebuah kebutuhan untuk mengkaji bagaimana sistem ekonomi yang dijalankan selama ini dalam mengatasi persoalan pangan serta mengkaji sistem ekonomi alternatif (dalam hal ini sistem ekonomi Islam) untuk selanjutnya mendapatkan solusi dan perbaikan terbaik atas persoalan tersebut.

## Landasan Teori

Pengaturan pangan dalam bahasan ini terkait dengan sistem yang digunakan, bukan bahasan mengenai ilmu ekonomi yang dipakai. Sebab antara sistem ekonomi dan ilmu ekonomi terdapat perbedaan yang mendasar. Ilmu ekonomi akan membahas bagaimana pangan diproduksi secara optimal, teknik-teknik terbaik, efektif dan efisien dalam menghasilkan produk terbaik atau unggul. Ilmu ekonomi bersifat bersifat netral, obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup, keyakinan, kepercayaan maupun ideology tertentu. Ilmu ekonomi merupakan alat (*tools*) yang digunakan untuk kebutuhan menghitung, sebuah proses produksi, biaya produksi, efisiensinya untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal. [3]Sedangkan ketika berbicara mengenai sistem ekonomi, maka ini terkait dengan pandangan, keyakinan, kepercayaan ataupun ideology tertentu.

### Ketahanan Pangan Dalam Sistem Kapitalis

Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia, Maxwell dan Frankenberger yakni "jaminan akses setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a*

[3] Dwi Condro triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara* ( Yogyakarta: Irtikaz, 2012), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*healthy life*). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI pada tahun 1999 diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan.[4]

Ketersedian pangan menurut kapitalis adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersedian pangan dalam hal ini lebih sering dilihat secara makro. Artinya jika stok memadai dibandingkan tingkat kebutuhan secara makro maka ketersediaan pangan dianggap telah cukup.

Adapun masalah distribusi dan bisa atau tidak diakses oleh tiap individu, itu bukan menjadi perhatian.. Disamping itu dengan filosofi kebebasan dalam kapitalis maka penyediaan pangan harus diberikan kepada swasta secara bebas. Ketersediaan pangan yang ditempuh pada sistem kapitalis ini tidak membatasi pelaku penjamin ketersedian pangan adalah negara.

Kondisi seperti ini memungkinkan pihak-pihak lain di luar negara (swasta dalam dan luar negeri) bisa mengambil andil yang sangat besar. Akibatnya terjadilah monopoli bahan pangan, menumpuknya kendali *supply* pangan pada sekelompok orang, serta impor yang menyebabkan ketergantungan kepada negara lain.

**Ketahanan pangan dalam sistem Islam** tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.

Ketahanan pangan dalam Islam mencakup:[5]

a) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan

---

[4] http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf, diakses 20/11/2013

[5] Yahya Abdurrahman, *Ketahanan Pangan Perspektif Islam.* www.hizbut-tahrir.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara dalam pandangan Islam memiliki tugas untuk melakukan kepengurusan terhadap seluruh urusan rakyatnya, baik dalam ataupun luar negeri ( *ri'âyah su`ûn al-ummah*). Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan (selain kebutuhan pokok sandang dan papan serta kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan keamanan) seluruh rakyat individu per individu. Dalil bahwa itu merupakan kebutuhan pokok diantaranya bahwa Imam Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang dishahihkan oleh Ahmad Syakir dari jalur Utsman bin Affan ra., bahwa Rasulullah saw bersabda:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول
حدثني حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
: كل شيء سوى ظل بيت وجلف الخبز وثوب يوارى عورته والماء فما فضل عن هذا
فليس لابن آدم فيهن حق [6]

Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, dan pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya.

Sabda Rasul di dalam hadits tersebut "apa yang lebih dari ini maka anak Adam tidak memiliki hak di dalamnya" menunjukkan bahwa jelas tiga kebutuhan inilah yang merupakan kebutuhan pokok. Hadits ini menyatakan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu pangan, papan dan sandang.Yang lebih dari itu maka bukan kebutuhan pokok, dan pemenuhannya terjadi dimana kebutuhan-kebutuhan pokok individu itu telah terpenuhi.

Dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, negara akan menggunakan dua mekanisme yaitu :

1). Mekanisme Non Ekonomi, dimana negara memastikan agar hukum-hukum syariat terkait dengan nafkah berjalan sebagaimana mestinya. Islam memerintahkan agar setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannnya seperti dalam surah al-Baqarah ayat

[6] Musnad Ahmad bin Hambal, Juz 1,62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

233. Jika kemudian pemenuhan kebutuhan pokok bagi dia dan keluarganya belum terpenuhi, baik karena ia tidak bisa bekerja atau pendapatannya tidak cukup, maka kerabatnya mulai yang terdekat diwajibkan untuk turut menanggungnya. Jika belum terpenuhi juga maka tanggungjawab itu beralih menjadi kewajiban baitul mal (negara). Rasul saw bersabda:

« أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ، وَعَلَيَّ »

"Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajibanku." (HR. an-Nasai dan Ibnu Hibban)

Disamping itu, ketika kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok pangan tidak terpenuhi maka orang tersebut berhak atas harta zakat. Karena itu orang tersebut berhak meminta harta zakat ke Baitul Mal dan amil zakat.

2). Mekanisme Ekonomi , yang dimaksud di sini adalah keterlibatan individu dalam aktivitas ekonomi untuk mendapatkan harta sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Mekanisme ini saling melengkapi dengan mekanisme non ekonomi di atas. Secara lebih tepatnya adalah pemberian peluang bagi setiap orang khususnya laki-laki untuk bekerja. Sebab Islam mewajibkan setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja. Dalam hal ini negara wajib menyediakan lapangan dan kesempatan kerja. Agar kesempatan kerja bisa terbuka seluas-luasnya melalui cara ini, negara harus mewujdukan dan menjamin adanya iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat. Sehingga negara harus menjamin terealisasinya terlaksananya hukum-hukum syariat terkait dengan ekonomi, seperti hukum-hukum kepemilikan, hokum pengembangan dan pengelolaan harta serta jaminan distribusi harta di tengah-tengah masyarakat.

**Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan sebagai faktor penentu Ketahanan Pangan**

Untuk menjamin ketersediaan pangan maka negara harus menjamin produksi pangan pada tingkat yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi dalam negeri tidak cukup maka bisa dipenuhi dari impor dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dalam negeri dan negara. Hanya saja tidak diperbolehkan ketersediaan pangan bergantung pada impor. Kebijakan impor diambil namun tidak dilakukan dalam jangka panjang/terus menerus.

Negara harus menjamin pelaksanaan politik pertanian dan politik pertanahan syariah. Hal itu akan menjamin ketersedian lahan dan produktivitas lahan. Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, maka tanah mati itu bisa dihidupkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya itu.

Demikian juga dengan tanah yang ditelantarkan tiga tahun berturut-turut maka hak kepemilikannya atas tanah itu hilang. Selanjutnya tanah yang ditelantarkan pemiliknya tiga tahun berturut-turut itu diambil oleh negara dan didistribusikan kepada individu rakyat yang mampu mengolahnya, tentu dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan secara adil.

Keterjangkauan pangan yang dimaksudkan adalah terdistribusinya pangan di seluruh wilayah dan dengan tingkat harga yang wajar. Untuk itu pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi menjadi suatu keniscayaan. Begitu pula penyebaran informasi pasar dan informasi produksi juga harus dikelola dengan baik oleh negara dan dibuka aksesnya untuk semua. Pendistribusian hasil pertanian ke seluruh wilayah tentu membutuhkan waktu, sementara sifat produk pertanian kebanyakan adalah *perishable* (mudah rusak). Karena itu untuk menjamin keterjangkauan pangan ini, negara juga harus mengembangkan teknologi pasca panen dan menyebarkannya ke para pelaku usaha pertanian. Litbang untuk itu bisa dikerjakan di pusat-pusat litbang yang didirikan oleh Negara. Teknologi pasca panen jelas menuntut penguasaan selain sains juga teknologi dan pengadaan teknologi itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memahami kejadian yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah[7]. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur baik berupa dokumen tulis seperti catatan, buku, maupun penelitian terdahulu dan bentuk artifact lain yang relevan.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari sumber yang ada seperti buku, makalah, artikel, jurnal, surat kabar, majalah ilmiah dan internet yang berhubungan dengan judul penelitian. Selanjutnya dari data yang terkumpul akan dilakukan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan.

3. Analisis dan interpretasi Data

   Analisis data menurut Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola atau kategori tertentu sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[8]

   Berikut ini tahap analisis data secara umum :

   a) Melakukan penelaahan seluruh data secara mendalam
   b) Memberikan kode pada data yang berulangkali muncul dan memasukkannya ke dalam kelompok tertentu
   c) Menyusun berdasarkan tipologi
   d) Membaca kepustakaan yang ada dengan masalah dan latar penelitian

4. Teknik Analisis, dalam hal ini menggunakan analisis historis, yaitu melakukan analisis kejadian-kejadian di masa yang lalu untuk mengetahui kenapa dan

[7] Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif.* ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6
[8] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian…,*280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana menentukan apakah rentetan kejadian tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.[9]

**Gambaran Umum Obyek Penelitian**

**A. Kondisi dan Kebijakan Dalam Negeri**

1. Luas / lahan pertanian dan Jumlah Petani

Besaran produksi yang dihasilkan dapat dilihat dari sejauh mana ketersediaan lahan yang ada. Dalam kasus lahan persawahan saja pada tahun 2007 terlihat bahwa luasnya semakin cepat saja berkurang. Luas lahan sawah tidak mengalami peningkatan disebabkan biayanya yang mahal, dan banyak dikonversi untuk keperluan non pertanian seperti untuk perumahan, infrastruktur jalan, industry, pembangunan pusat perbelanjaan ,perkantoran sampai untuk pemakaman. Pemerintah daerah di sejumlah daerah tertentu telah mengajukan permohonan alih fungsi lahan sawah irigasi ke BPN seluas 3, 099 juta ha. Dampaknya akan berkurangnya 10 juta ton beras dari produksi yang sudah ada.[10] Jika data luas lahan semakin menyusut, bisa dipastikan bahwa jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani juga ikut mengalami penyusutan. Hal ini ditambah dengan adanya arus urbanisasi yang membuat lahan-lahan tidak ada yang mengerjakan, karena menjadi petani bukan lagi menjadi profesi yang menarik. Pada umumnya lebih memilih hijrah ke kota atau justru mengerjakan pekerjaan lain.

Dari data BPS nampak bahwa konversi lahan pertanian tertinggi adalah digunakan untuk perumahan sebesar 29,64%, perkebunan dan menjadi tanah kering 20,52%.

[9] http://phairha.blogspot.com/2012/01/studi-kepustakaan.html diakses 18 oktober 2013

[10] Tulus Tambunan, *Ketahanan pangan di Indonesia Inti Permasalahan dan Alternatif Solusinya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian berdasarkan data sensus tahun 2010 oleh dari BPS menunjukkan pertanian menempati posisi tertinggi sebesar 40,5 persen. Sedangkan menurut pengelompokan sembilan sektor lapangan usaha itu antara lain adalah 40,50 persen lapangan usaha berada di sektor pertanian. Selain itu, lapangan usaha yang juga cukup menonjol adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Rumah Makan (18,40 persen), sektor Jasa-Jasa (15,70 persen), dan sektor Industri Pengolahan (10,80 persen).[11]

2. Kebutuhan pangan, jika dibandingkan dengan data sebelumnya (produksi), maka terdapat kesenjangan dengan jumlah yang dibutuhkannya. Misalnya saja produksi kedelai sejumlah 847.157 ton sedangkan kedelai yang dibutuhkan sejumlah 1.034.246 ton terdapat kekurangan stok kedelai sebanyak 187.089 ton. Begitu juga dengan komoditi yang lainnya (produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri). Menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) terdapat 28 komoditas pangan masyarakat Indonesia yang diimpor, dengan total impor sebesar persen dari total kebutuhan dalam negeri.

3. Subsidi

Pasca krisis 1998 dengan masuknya IMF yang berposisi sebagai konsultan keuangan Indonesia, terjadi reformasi di bidang pertanian. Yaitu pengurangan subsidi pertanian khususnya subsidi untuk pupuk. Akibat pengurangan subsidi, berbagai fasilitas dan dukungan kepada petani makin kecil dan bahkan menghilang.

Paket kebijakan Desember 1998 berupa penghapusan subsidi berdampak besar terhadap peningkatan harga pupuk di tingkat petani. Penelitian Adnyana dan Kariyasa tahun 2000 menyatakan bahwa penghapusan subsidi pupuk tersebut mengakibatkan harga eceran tertinggi KUT untuk pupuk urea naik dari Rp 450/kg menjadi Rp 1.115/kg (kenaikan 147%), SP-36 dari Rp 675 menjadi Rp 1.600/kg (137%), KCL Rp 1.650/kg (sebelum kebijaksanaan Desember 1998,

[11] Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi.* Katalog BPS, Edisi 35 April 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ditetapkan harganya), dan pupuk ZA naik dari Rp 506/kg menjadi Rp 1.000/kg (98%).[12]

4. Praktik Kartel

Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal.

Kartel dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memperoleh market power. market power ini memungkinkan mereka mengatur harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar. pengaturan persediaan dilakukan dengan bersama-sama membatasi produksi dan atau membagi wilayah penjualan.

Impor yang dilakukan pemerintah pada pelaksanaannya diserahkan kepada swasta. Beberapa importir memiliki hak untuk mengimpor komoditi tertentu dalam jumlah besar. Bahkan dalam kasus kedelai, sebanyak 66,3 persen kuota impor dari Amerika serikat dikuasai tiga perusahaan importir saja, sementara Bulog hanya mendapatkan 4,4% dari kuota[13].

Di pasar internasional, setidaknya terdapat 12 perusahaan multinasional yang diduga terlibat kartel serealia, agrokimia, dan bibit tanaman pangan. Di dalam negeri ada 11 perusahaan dan enam pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.[14]

Keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah membuka jalan bagi perusahaan multinasional memonopoli usaha perbenihan dan pangan. Komite Ekonomi Nasional (KEN) misalnya menyebutkan di pasar

---

[12] *STUDI KOMPREHENSIF KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK*

[13] http://bisniskeuangan.kompas.com, 10/09/2013

[14] Sabiq Carebest, *Mewaspadai Imperialisme Benih dan Kartel Pangan* , 18/3/2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut "ABCD", yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90 persen pangsa perdagangan serealia (biji-bijian) dunia. Struktur pasar komoditas pangan juga memiliki kecenderungan oligopolistik.

Pada sektor pangan, kartel juga terjadi pada industri pangan dan impor. Indikasinya, satu per satu perusahaan makanan domestik diakuisisi perusahaan asing. Misalnya, Aqua diakuisisi Danone (Prancis), ABC diakuisisi Unilever (Inggris), dan Kecap Bango dikuasai Heinz (Amerika). Sementara itu, tren misalnya pada impor daging mayoritas rupanya dari Australia, bawang putih dari Tiongkok, dan bawang merah dari Filipina. Pada tahun 2012 lalu, total impor pangan senilai Rp. 81.5 Triliun, disinyalir kartel importer bahan pangan mengambil sekitar 30 persen keuntungan pertahun atau sekitar Rp. 11.3 Triliun.

5. Dampak Globalisasi

Dengan adanya kebebasan dalam perdagangan bebas, membuat antar Negara menjadi *borderless*, maka demikian juga dengan pertanian yang harus dapat menerima serbuan barang-barang dari luar. Indonesia menerapkan tingkat tarif (applied tariff) lebih rendah dari yang yang didaftarkan (bound) di WTO. Itu adalah fenomena umum terjadi di Negara berkembang (NB) tidak hanya Indonesia. Seperti yang telah disebutkan di depan, ada berbagai alasan mengapa itu terjadi. Salah satu diantaranya, komitmen terhadap lembaga keuangan internasional, sebagai akibat dari hutang luar negeri. Dari data tahun 1998 sampai dengan 2003 diketahui terdapat serbuan lonjakan impor di beberapa enam komoditi utama. Angka impor tertinggi ada pada impor daging disisi lain enam komoditi ini dinegara tujuan impor adalah komoditas yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yang bersangkutan.

6. Peran Bulog

Indonesia memiliki BULOG sebagai lembaga pangan yang pada masanya diakui dapat menjamin bekerjanya subsistem distribusi secara optimal, akan tetapi transformasi kelembagaan, pembatasan kewenangan berkaitan dengan kegiatan operasional dan pengelolaan komoditi (hanya beras) sebagai akibat dari tekanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari IMF dan World Bank. Pada era reformasi lembaga duni ini telah mereduksi peran BULOG secara signifikan dalam menunjang keberhasilan subsistem ini. BULOG saat ini hanya memiliki kewenangan untuk mengurus beras, dari yang semula mengurusi enam kebutuhan bahan pangan. Cadangan BULOG untuk mengurus beras pun hanya sebesar 7-8% saja. Dengan kondisi seperti itu, maka BULOG sebagai representasi kekuatan Negara tidak memilki kemampuan untuk melakukan stabilisasi harga jika terjadi gejolak.[15]

Kenyataan sejarah membuktikan bahwa tekanan barat dalam kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia agar lebih 'bersahabat' dengan mekanisme pasar membawa banyak konsekuensi secara struktural dan kelembagaan. Salah satu perubahan kelembagaan di bidang pangan adalah beralihnya status kelembagaan BULOG dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum. Perubahan status kelembagaan ini membawa konsekuensi bagi BULOG untuk kehilangan berbagai otoritas dalam kemampuannya melaksanakan stabilisasi harga dan pengelolaan berbagai komoditi yang dianggap strategis oleh pemerintah. Hal ini berarti bahwa BULOG juga harus kehilangan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebagai sumber pendanaan kegiatan operasionalnya.[16] Beralihnya status BULOG dari LPND menjadi Perusahaan Umum juga akan membuat posisinya juga berorientasi profit. Tidak tepat jika lembaga yang tujuannya memberi pelayanan pada masyarakat namun justru berubah menjadi lembaga yang juga berorientasi laba.

## Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam

Pengelolaan pangan saat ini menunjukkan masih jauh dari kemandirian dan ketahanan pangan yang menjadi tujuan setiap Negara. Idealnya kebutuhan pangan harus dipenuhi dari produksi sendiri, jika tidak terpenuhi barulah ditempuh mekanisme impor. Namun angka impor

---

[15] Khudori, *Negara dan Pengelolaan Pangan*. Makalah Diskusi "*Negara dan Pengelolaan Pangan: Upaya Bersama Mendorong Penguatan Pangan Nasional*", International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Hotel Akmani, Jakarta, 30 Juli 2013.

[16] Wiwid Ardhianto ,*Memposisikan Kembali BULOG Sebagai Garda Depan Ketahanan Pangan Pada Subsistem Distribusi*, Makalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pangan yang mencapai 70 persen atau senilai 125 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan sangat tergantung dari pasokan luar negeri.

Sistem yang dijalankan adalah sistem ekonomi kapitalis karena terlihat dari pengaturan politik ekonomi yang lebih berpihak pada para kapitalis, indikasi ini nampak dari pengaturan pemenuhan pangan bukan menjadi tanggung jawab utama negara tetapi justru diserahkan pada sekelompok orang yang menimbulkan pelaku kartel. Pemenuhan produksi dalam negeri kurang mendapat dukungan seperti berkurangnya subsidi, minimnya pengembangan teknologi yang mudah dan murah, hilangnya proteksi terhadap petani lokal dan justru membuka lebar keran impor yang artinya para petani harus beradap-hadapan langsung dengan komoditi impor. Sementara posisi negara yang diwakili leh BULOG sangat minim sebatas komoditi beras itupun dalam prosentase yang tidak dominan. Semua ini berawal dari komitmen untuk melaksanakan nasihat lembaga dunia (IMF) sebagai konsekuensi besarnya hutang luar negeri Indonesia.

Pengelolaan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya.

Pengelolaan pangan mencakup sektor produksi pertanian, kebijakan sector industry pertanian, dan kebijakan sector perdagangan hasil pertanian, berikut dengan pelaksanaan seperangkat hukum-hukum yang terdapat dalam Islam.

Solusi pengelolaan pangan yang menghantarkan pada ketahanan pangan, akan mencakup Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan, melalui mekanisme ekonomi dan non ekonomi. Pelaksanaan hukum-hukum syariat terkait dengan ekonomi, seperti hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan dan pengembangan kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat. Implementasi segera adalah mengembalikan kembali sumber daya alam yang saat ini dikuasai asing menjadi milik masyarakat secara umum. Selama ini kerugian yang diderita Indonesia akibat menyerahkan sumber daya alam ke asing sebesar 7.200 trilyun rupiah. Bahkan jika ditotal, pajak dan royalti yang harus dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel, di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 trilyun (belum termasuk tambang emas dan tembaga), ini artinya bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai Rp 20 juta[17]. Sebuah jumlah yang sangat cukup untuk menanggung lebih dari sekedar kebutuhan pokok rakyat.

Menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi yang menghambat, seperti penimbunan, *kanzul maal,* riba, monopoli, penipuan. Tersedianya informasi ekonomi dan pasar bagi semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar. Memberikan bantuan teknis, teknologi dan litbang, informasi, dan modal kepada rakyat yang mampu berusaha/bekerja. Serta negara menghilangkan sektor non riil, sehingga harta hanya akan berputar di sektor riil (produksi dan distribusi barang dan jasa) saja.

Untuk menjamin produksi pangan setidaknya negara harus melaksanakan politik pertanian dan politik pertanahan syariah dalam artian mengkatifkan kembali lahan-lahan tidur/terlantar untuk diberikan kepada yang mampu dan mau mengerjakan, selanjutnya menempuh intensifikasi pertanian, maksudnya untuk meningkatkan produktifitas tanah. Intensifikasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi, penggunaan pupuk, obat-obatan, teknologi, teknik produksi, pola tanam, penggunaan benih unggul, penggunaan alat dan mesin pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi kultur jaringan dan rekayasa tanaman dan rekayasa genetika, dan sebagainya.

Produksi pertanian yang baik apalagi intensifikasi tidak bisa jalan tanpa didukung oleh infrastruktur pertanian yang memadai. Karena itu sebagai bagian dari *ri'ayah asy-syu'un*, negara melalui direktorat terkait harus membangun infratsruktur pertanian seperti waduk, bendungan, jaringan irigasi, balai-balai pertanian, jalan, dsb. Disamping itu negara juga harus memiliki tenaga penyuluh dan pembimbing pertanian yang mencukupi dan memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan penyuluhan, pembimbingan dan memandu para petani melakukan produksi dengan teknik, cara yang paling efisien dan paling produktif. Diluar semua itu, negara pun bisa memberikan bantuan subsidi langsung maupun tidak langsung, bantuan fasilitas, informasi dan bantuan lainnya yang dibutuhkan.

Setelah itu hasil pertanian agar dapat diproduksi secara kontinyu dibutuhkan pengaturan stok dan pengendalian logistik. Pengaturan logistik diantaranya dengan menerapkan pengaturan pola dan musim tanam yang dikombinasikan dengan pembagian

[17] Abraham Samad (ketua Komisi Pemberantasan Korupsi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pengaturan daerah produksi. Hal ini bisa dilaksankan dengan terlebih dahulu melakukan *mapping* di setiap daerah. kemudian bisa dilengkapi dengan pengembangan sentra-sentra produksi produk pertanian dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis tanaman dengan karakteristik tanah dan iklim tiap daerah.

Solusi pengelolaan pangan yang mewujudkan ketahanan pangan hanya akan terealisir jika ada *goodwill* dari semua pihak untuk mau menerapkan system ekonomi Islam demi Indonesia yang lebih baik. Demikian pula hendaknya mengkaji ulang perjanjian-perjanjian yang secara nyata merugikan bangsa Indonesia dengan mengedepankan kemandirian sebagai Negara yang berdaulat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id